

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membangun ekonomi suatu negara dibutuhkan lembaga keuangan untuk membiayai pembangunan. Dengan adanya lembaga keuangan, maka pembangunan nasional khususnya pada bidang ekonomi dapat terlaksana dengan lancar karena lembaga keuangan akan memberikan modal bagi masyarakat yang akan membuka usaha. Lembaga keuangan yang terlibat dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan diserahkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. Banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha demi kelangsungan hidupnya secara individu maupun kelompok menimbulkan peran keikutsertaan lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyediakan dana untuk masyarakat yang akan memulai usahanya melalui kredit.

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama dan sumber pendapatan utama bagi bank. Namun, masalah yang akan dihadapi oleh suatu bank adalah ketika nasabah sudah tidak sanggup mengembalikan pinjamannya sehingga terjadi kredit bermasalah dalam suatu bank. Penyebab terjadinya kredit bermasalah kemungkinan pada pihak bank dikarenakan keteledoran bank dalam mematuhi peraturan pemberian kredit, kurangnya pengawasan, serta pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank, sedangkan dari pihak debitur terjadi kredit

bermasalah kemungkinan karena adanya kesalahan dalam mengelola usaha hingga mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Dalam pelaksanaannya, bank harus mempertimbangkan berbagai hal yang terkait, agar kredit yang diberikan dapat kembali tanpa merugikan pihak bank maupun debitur.

Kinerja bank di Indonesia sudah mulai membaik. Rasio kredit bermasalah (NPL) mengalami penurunan sehingga permintaan kredit menjadi meningkat. Namun, pada kenyataannya bank tetap harus waspada dan teliti terhadap laporan keuangan calon debitur serta perlu adanya perbaikan berkelanjutan dengan mengalokasikan lebih biaya pencadangan agar NPL tidak kembali meningkat. Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dapat mengurangi rasio kredit bermasalah. Oleh karena itu, NPL bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pada Statistik Perbankan Indonesia per Desember 2014, NPL Bank Perkreditan Rakyat mencapai 3.252 triliun sementara total kredit pada saat itu sebesar 68.391 triliun maka tingkat rasio NPL Desember 2014 sebesar 4,8%. Pada Statistik Perbankan Indonesia per Desember 2015, NPL Bank Perkreditan Rakyat mencapai 4.018 triliun dengan total kredit sebesar 74.807 triliun, maka tingkat rasio NPL pada Desember 2015 sebesar 5,4%. Sedangkan pada Statistik Perbankan Indonesia per Oktober 2016, NPL Bank Perkreditan Rakyat mencapai 5.357 triliun dengan total kredit sebesar 80.330 triliun, maka tingkat rasio NPL pada Oktober 2016 adalah sebesar 6,7%. Total Bank Perkreditan Rakyat hingga saat ini sebanyak 1.637 bank. PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia merupakan salah satu bank yang

menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Tingkat NPL pada PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia patut diperhatikan agar tidak terjadi kredit bermasalah yang terlalu tinggi. Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa bank harus memenuhi rasio NPL kurang dari 5%. Oleh sebab itu PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia harus berhati-hati dalam memberikan kredit pada nasabah agar rasio NPL dapat kurang dari 5%.

Dalam memberikan kredit, pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit yang sehat. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :

“Dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), kondisi ekonomi debitur (condition of economy). Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi.”

Pihak bank diharapkan teliti dalam memberikan modal pinjaman/kredit kepada calon debitur. Analisa yang akurat terhadap keuangan calon debitur sangat diperlukan guna mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah.

Mengetahui betapa pentingnya pertimbangan dalam pemberian kredit oleh bank terhadap masyarakat yang membutuhkan guna mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah maka peneliti mengambil judul “ANALISIS KREDIT SEBAGAI FAKTOR PENGURANG

TERJADINYA KREDIT BERMASALAH PADA PT BPR AMANAT KESEJAHTERAAN INDONESIA KOTA BATU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis kredit yang diterapkan oleh PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kredit pada PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah dan menambah pengetahuan terutama mengenai analisis kredit dalam dunia perbankan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti selanjutnya dan dapat digunakan sebagai proses pembelajaran untuk program pendidikan khususnya pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang sebelum memasuki dunia kerja.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi manajemen dalam penentuan keputusan pemberian kredit melalui analisis kredit untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah.

